

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi yang berlokasi di Kompleks Departemen Sosial, RT 002/RW 021, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. STPL Bekasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui STPL Bekasi mengelola berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok rentan atau kelompok marginal agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi (Abdillah, 2025) (Observasi, Senin, 13-01-2025).

Landasan hukum pembentukan STPL Bekasi berdasarkan surat Kemensos nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial. Selain itu, pembentukan STPL juga didukung oleh beberapa undang-undang terkait kesejahteraan sosial, antara lain Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini mengatur upaya peningkatan kualitas hidup, termasuk penyelenggaraan rehabilitasi pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-

undang ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan landasan hukum tersebut, STPL Bekasi berperan penting dalam menyediakan layanan sosial yang komprehensif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk pemberdayaan dan rehabilitasi sosial (Abdillah, 2025).

Dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, pemerintah melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 memberikan bentuk layanan, salah satunya pelatihan vokasional. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial yang berujuan untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan kemandirian para penerima manfaat.

Di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI, pelatihan vokasional menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk membekali peserta agar mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara mandiri.

Melalui pelatihan vokasional, penyandang disabilitas didorong untuk memiliki kemampuan kerja yang produktif, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi, yang ditandai dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan pada bantuan pihak lain. Dengan demikian, program pelatihan vokasional tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan keterampilan, tetapi

juga sebagai strategi pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi pada awalnya merupakan kompleks yang terdiri dari tiga balai dengan fungsi yang berbeda. Balai Pangudi Luhur yang khusus melayani gelandangan dan pengemis. Balai Tan Miyat berfokus pada rehabilitasi penyandang disabilitas. Balai Budi Dharma berfokus pada pelayanan kelompok lanjut usia. STPL Bekasi memiliki peran yang strategis dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikososial, dan keterampilan vokasional bagi para penerima manfaat (Observasi, Kamis, 13-01-2025).

Sentra ini memberikan berbagai jenis pelatihan keterampilan kepada para penerima manfaat (PM), yang mencakup beberapa kluster, yaitu penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan sensorik), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Anak Berdampingan Dengan Hukum (ABH), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), kelompok rentan atau yang termarginalisasi, hingga lansia. Selain itu, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi juga memberikan pelayanan kepada penerima manfaat lainnya seperti penyalahguna NAPZA serta orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) yang membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi sosial. Setiap jenis penerima manfaat diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan vokasional sesuai dengan minat dan potensi mereka berdasarkan hasil asesmen awal (Abdillah, 2025) (Wawancara, Senin-10-02-2025).

STPL Bekasi memiliki beragam program pelatihan vokasional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, kemampuan hidup dan keberfungsian sosial para penerima manfaat. Kelas vokasional yang dilaksanakan di STPL Bekasi, antara lain kelas *massage*, kerajinan tangan dari kulit, kelas menjahit, kelas salon dan tata rias, kelas olahan pangan, kelas komputer, kelas otomotif, kelas perikanan, dan pengelolaan sampah. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang kewirausahaan yang dapat memberdayakan para penerima manfaat secara mandiri nanti kedepannya (Habiballoh, 2025).

Dalam konteks penyelenggaraan pelatihan vokasional tersebut, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang membutuhkan intervensi pemberdayaan yang berkelanjutan. Di Indonesia, penyandang cacat atau disabilitas sering menghadapi diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas, dan tantangan dalam dunia kerja akibat stereotip sosial yang memandang mereka sebagai kelompok lemah atau tidak produktif. Secara etimologis, kata “cacat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna, yaitu kekurangan yang menyebabkan sesuatu menjadi kurang baik atau kurang sempurna, baik pada benda, tubuh, batin, maupun akhlak. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi negatif dan menempatkan individu yang memiliki perbedaan fisik atau mental sebagai pihak yang tidak utuh atau kurang sempurna.

Sebagai upaya memperbaiki terminologi dan cara pandang terhadap kelompok ini, pada tahun 2009 diselenggarakan Semiloka Nasional di Cibinong,

Bogor yang diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiolog, perwakilan pemerintah, komunitas penyandang disabilitas, dan Komnas HAM. Forum tersebut melahirkan perubahan istilah dari “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas”. Pergeseran ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga menandai perubahan paradigma sosial dari konotasi negatif menuju pengakuan hak, martabat, dan kesetaraan. Secara konseptual, perubahan istilah ini sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang disahkan PBB pada 2006 dan diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui (Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan seringkali mengalami ketidaksetaraan atau kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural (Pangestuti, 2021). Banyak dari penelitian terdahulu yang telah menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki penampilan atau kondisi fisik yang tampak berbeda dari ukuran normal atau standar yang dianggap wajar oleh masyarakat, sering kali dianggap sebagai yang tidak diinginkan/*not desirable* dan tidak dapat diterima/*not acceptable* sebagai bagian dari komunitas (Couser, 2009, h.1; Rothman, 2003, h. 4-7) dalam (Widinarsih, 2019).

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan sosial, struktural dan ekonomi yang menghalangi kemandirian mereka. Dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, sekitar sepertiga penyandang disabilitas masih belum menamatkan pendidikan dasar serta partisipasi kerja masih rendah. Berdasarkan

laporan survei global tahun 2023, sekitar 16% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas dengan 80% diantaranya tinggal di belahan bumi bagian selatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa pada 2023 atau sekitar 8,5% dari total populasi di Indonesia dengan sekitar 17 juta diantaranya berada pada usia produktif, namun tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas usia produktif hanya 45%,. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam akses pekerjaan dan kesempatan ekonomi (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh akses setara terhadap sumber daya ekonomi. Banyak dari mereka yang memiliki potensi dan kemampuan kerja, namun masih terbatas oleh stereotip sosial yang masih melekat, seperti pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan hanya bergantung pada bantuan sosial, yang mana hal tersebut menjadi hambatan utama dalam integrasi sosial mereka. Stereotip ini menghambat kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia, sehingga dibutuhkan pelatihan vokasional untuk membantu mereka dari yang merasa terpinggirkan menjadi mandiri dan berdaya.

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dinilai relevan dalam penelitian ini. PAR menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan sosial, sedangkan peneliti berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif dan refleksi kolektif dalam proses pemberdayaan (Affandi, et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan penyandang disabilitas terlibat langsung dalam

mengidentifikasi hambatan sosial yang mereka alami dan mencari solusi secara bersama.

Penelitian terdahulu banyak membahas efektivitas pelatihan vokasional dalam meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas. Namun, sebagian besar studi tersebut hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kerja secara individual, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan pencapaian kemandirian ekonomi sebagai tujuan akhir dari proses pemberdayaan. Selain itu, kajian mengenai bagaimana penyandang disabilitas terlibat secara aktif dalam keseluruhan proses pelatihan mulai dari partisipasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi masih belum tergambar secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan aktif yang berperan dalam menciptakan perubahan untuk berdaya secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, dinamika, dan hasil pemberdayaan penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi melalui program pelatihan vokasional, serta memahami bagaimana keterlibatan aktif para penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam kontribusi terhadap perubahan kemampuan, kepercayaan diri, dan kesiapan diri. Dari penjelasan tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjadikan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi sebagai objek penelitian dengan judul “Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Program Pelatihan Vokasional (*Participatory Action Research* di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini ialah kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional dengan metode *Participatory Action Research* di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Maka, dari fokus tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, sebagai berikut ini :

1. Bagaimana penciptaan peluang dalam mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam mendorong kemandirian ekonomi?
2. Bagaimana perlindungan sosial dan dukungan melalui program pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas?
3. Bagaimana pemeliharaan untuk menjaga stabilitas kemandirian ekonomi penyandang disabilitas pasca mengikuti program pelatihan vokasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan arah dan fokus dalam upaya menjawab permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut ini.:

1. Untuk mengetahui proses penciptaan peluang dalam mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas melalui program pelatihan vokasional dalam mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan sosial dan dukungan yang diberikan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam mendorong penyandang disabilitas mencapai kemandirian ekonomi.
3. Untuk mengetahui proses pemeliharaan yang dijalankan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dalam menjaga stabilitas kemandirian ekonomi penyandang disabilitas setelah mengikuti program pelatihan vokasional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi program studi Pengembangan Masyarakat Islam dalam mendukung dan pengembangan mata kuliah, Diantaranya, mata kuliah Teori Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat yang membahas pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini juga berkaitan dengan mata kuliah Teori PMI dan Pekerjaan dan Pelayanan Sosial yang membahas upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, serta Psikologi Dakwah dan Sosiologi Pembangunan yang mengkaji aspek psikologis dan dinamika sosial masyarakat marginal, selain itu penelitian ini juga relevan dengan mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat dalam peningkatan kemandirian ekonomi, dan Riset Aksi yang berfokus pada keterlibatan langsung

dalam proses indentifikasi masalah, perumusan masalah dan solusi, serta evaluasi melalui metode *Participatoty Action Research*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas serta dapat memberikan dampak positif bagi Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan bagi pendamping, fasilitator, dan lembaga pemberdayaan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pelatihan vokasional agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas dalam mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyandang disabilitas sebagai sumber pembelajaran dan motivasi untuk mengenali potensi diri, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas ekonomi secara mandiri.

E. Landasan Pemikiran

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi sebagai landasan, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses jalannya penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Konseptual

a. Kemandirian Ekonomi

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan yang berkaitan erat dengan tercapainya kemandirian ekonomi. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Sementara itu, tujuan pemberdayaan mengarah pada tercapainya perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas individu, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun kewenangan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial (Suharto, 2005).

Pada konteks kemandirian ekonomi, pemberdayaan berperan penting dalam mendorong individu agar mampu memiliki sumber penghasilan sendiri, mengembangkan potensi diri, serta tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Suharto (2014) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* menuliskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan posisi tawar masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan sosial, pemberdayaan dipandang sebagai strategi utama untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Pembangunan sosial pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, serta pengurangan ketergantungan struktural. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan penting yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Pemberdayaan dipahami sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan

meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Suharto menegaskan bahwa kegagalan pembangunan sering kali disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diarahkan pada perubahan posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kontrol sosial-ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kemandirian.

Dalam kerangka Teori Pemberdayaan Masyarakat, Suharto merumuskan strategi pemberdayaan yang dikenal dengan model 5P, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Model ini digunakan untuk menjelaskan tahapan dan pendekatan intervensi sosial yang bertujuan mendorong keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kemandirian ekonomi dalam penelitian ini diposisikan sebagai hasil dari proses pemberdayaan masyarakat. Kemandirian ekonomi merupakan *outcome* dari keberhasilan penerapan model 5P. Pemungkinan membuka ruang dan kesempatan ekonomi, penguatan meningkatkan kapasitas produktif, perlindungan menjamin keberlangsungan kelompok rentan, penyokongan menyediakan dukungan yang dibutuhkan, dan pemeliharaan memastikan keberlanjutan hasil pemberdayaan. Dengan demikian, kemandirian ekonomi tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses pemberdayaan yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

b. Masyarakat

Istilah *masyarakat* berasal dari kata *musyarak* dalam bahasa Arab yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Makna tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan dan hubungan timbal balik antarindividu dalam kehidupan bersama. Sementara itu, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society* yang merujuk pada sekelompok manusia yang hidup berdampingan dan membangun pola hubungan sosial secara teratur (Syani, 2012). Secara konseptual, masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan manusia yang berinteraksi secara terus-menerus dalam suatu sistem sosial tertentu, sehingga membentuk keteraturan, norma, dan struktur sosial yang relatif stabil. Interaksi sosial tersebut menjadi dasar terbentuknya nilai, aturan, dan kebiasaan yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang hidup bersama secara fisik, melainkan sebagai suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan sosial, kepentingan bersama, serta kesadaran kolektif. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membangun pola interaksi yang melahirkan norma dan nilai sosial sebagai pedoman bertindak. Norma-norma tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan kepentingan bersama. Dengan demikian, keberadaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses interaksi sosial yang berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan. (Soekanto, 2017)

Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai “kesatuan” hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Definisi ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki karakteristik utama berupa adanya kesinambungan interaksi sosial, sistem nilai dan adat istiadat yang diwariskan, serta identitas kolektif yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Koentjaraningrat, 2009). Adat istiadat dan nilai budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat sekaligus menjadi alat kontrol sosial dalam menjaga keteraturan sosial.

Identitas bersama dalam masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat kohesi sosial. Identitas bersama ini dapat terbentuk melalui kesamaan budaya, agama, bahasa, wilayah tempat tinggal, maupun pengalaman sejarah yang sama. Identitas tersebut tidak hanya mempererat hubungan sosial antarindividu, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Meskipun mengalami perubahan, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khasnya.

Proses perubahan sosial dalam masyarakat dapat berlangsung secara lambat maupun cepat, tergantung pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Faktor internal dapat berupa pertumbuhan penduduk, konflik sosial, maupun inovasi budaya, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh globalisasi, modernisasi, serta interaksi dengan masyarakat lain. Namun demikian, sistem sosial dan nilai budaya yang dimiliki masyarakat berperan sebagai filter dalam menyaring

pengaruh-pengaruh tersebut agar tidak menghilangkan identitas sosial yang telah terbentuk.

c. Penyandang Disabilitas

Beragam sudut pandang memaknai disabilitas sebagai kondisi yang melekat pada individu. Sebelum istilah disabilitas digunakan secara luas, masyarakat lebih dahulu mengenal istilah “cacat” untuk menyebut individu dengan kebutuhan khusus. Namun, seiring berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penggunaan istilah tersebut dinilai kurang tepat. Selanjutnya, muncul istilah “orang dengan ketunaan” sebagai bentuk perbaikan bahasa yang lebih halus. Perkembangan berikutnya menunjukkan adanya perubahan istilah menjadi “penyandang disabilitas” yang dianggap lebih menghargai martabat individu. Pergeseran istilah ini mencerminkan upaya untuk menggunakan bahasa yang lebih inklusif dan tidak menimbulkan stigma negatif, sehingga lebih dapat diterima secara sosial (Santoso, et al.,2017)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan tertentu. Secara konseptual, disabilitas merujuk pada kondisi fisik, mental, atau sensorik yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Secara undang-undang, penjelasan arti penyandang disabilitas yang terdapat pada Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat

mental; penyandang cacat fisik dan mental. Kemudian undang-undang tersebut diperbarui dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Pangestuti berpandangan bahwa, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan seringkali mengalami ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural (Pangestuti, 2021). Pemahaman negatif masyarakat tentang penyandang disabilitas berakar dari cara berpikir masyarakat yang masih terikat pada konsep kebiasaan umum atau ukuran umum masyarakat.

d. Program Pelatihan Vokasional

Program merupakan rangkaian kegiatan yang telah disusun dan direncanakan sebelum dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan yang memuat asas serta usaha (dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, maupun bidang lainnya) yang akan dijalankan. Menurut Farida (2008) mengartikan program sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil atau memberikan dampak tertentu. Dengan demikian, program dapat dipahami sebagai suatu instrumen yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian kegiatan yang terarah, terstruktur, dan terukur. Program tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, strategi, serta tahapan pelaksanaan guna memastikan tercapainya hasil yang optimal.

Keterampilan vokasional merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kesiapan individu dalam menjalankan aktivitas kerja secara nyata. Keterampilan ini termasuk dalam kategori kecakapan hidup (*life skills*) karena berfungsi membantu individu dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan pekerjaan. Dalam prosesnya, keterampilan vokasional tidak hanya menekankan pada praktik, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap konsep dan prosedur kerja sehingga individu mampu melaksanakan suatu tugas secara tepat dan efisien (Jaya, et al.,2018).

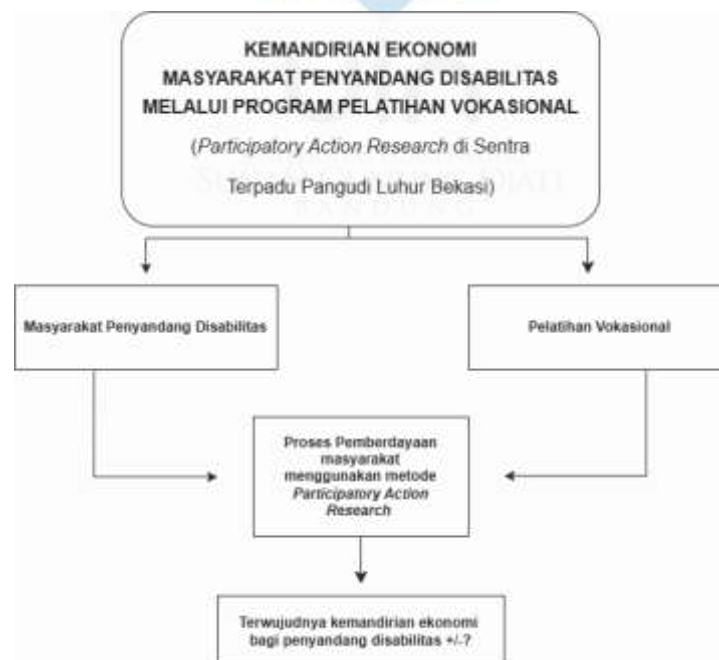
Keterampilan vokasional identik dengan kemampuan dalam bidang kejuruan tertentu yang bersifat spesifik dan aplikatif. Bentuknya dapat berupa keterampilan di bidang teknis maupun produksi, seperti pertanian, jasa, maupun industri kecil. Kemampuan ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga individu tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi (Hamdani, 2012). Dengan demikian, keterampilan vokasional memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang kerja serta mendorong produktivitas individu.

Dalam konteks penyandang disabilitas, penguasaan keterampilan vokasional menjadi salah satu upaya strategis dalam proses pemberdayaan. Hal ini karena keterampilan tersebut dapat membuka akses terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang lebih mandiri. Berdasarkan Pedoman Operasional ATENSI Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf c, pengembangan keterampilan dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penggalian potensi, penguatan minat dan bakat, penyediaan sarana

pendukung, serta akses terhadap peluang usaha. Selain itu, dukungan berupa bantuan kemandirian dan pengembangan jejaring juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses tersebut.

Tujuan utama dari pelatihan vokasional adalah untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, meningkatkan kemandirian, serta mempersiapkan mereka agar mampu bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan membantu individu mengenali dan mengembangkan minat serta bakatnya, sehingga dapat diarahkan pada bidang pekerjaan yang tepat. Dengan demikian, pelatihan vokasional tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kemampuan kerja, tetapi juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan individu secara berkelanjutan.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan observasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur yang berlokasi di Kompleks Departemen Sosial, RT 002/RW 021, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian pada hakikatnya merupakan upaya untuk menemukan dan membenarkan kebenaran melalui proses ilmiah. Dalam kegiatan penelitian, paradigma berperan sebagai cara pandang dan seperangkat keyakinan yang didasarkan atas asumsi tertentu dalam memahami realitas sosial (Herdiansyah, 2010). Herdiansyah menegaskan bahwa paradigma penelitian membantu peneliti menentukan arah, metode, dan teknik penelitian, sekaligus menjaga objektivitas dalam memahami objek secara utuh dan holistik.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yang berpandangan bahwa realitas sosial bersifat jamak, dinamis, serta dibentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial individu (Solichin, 2021). Pendekatan konstruktivisme digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap suatu peristiwa sekaligus mengungkap makna yang terkandung di balik aktivitas sosial yang berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada upaya menelusuri dinamika sosial yang sesuai dengan karakteristik pendekatan konstruktivis.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara alami di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan berangkat dari realitas empiris yang ditemukan selama proses interaksi berlangsung, bukan semata-mata berdasarkan kerangka teori yang telah ada sebelumnya. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana pengalaman penyandang disabilitas dalam mengikuti pelatihan vokasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dan refleksi kritis antara peneliti dan partisipan untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna. Pendekatan kualitatif dipilih karena memandang kenyataan sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dan penuh makna. (Kuswana, 2011)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan PAR berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. PAR juga berorientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat agar masyarakat dapat menjadi aktor perubahan, bukan obyek pengabdian.

Riset Aksi atau penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang berangkat dari realitas praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi serta

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, sekaligus merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, fokus utama dari pendekatan ini terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat (Aziz & Mukarom, 2023). Dalam paradigma PAR ini, masyarakat adalah agen utama perubahan, sehingga dosen/mahasiswa pelaksana pengabdian merupakan pihak lain yang melakukan fasilitasi dari proses perubahan tersebut. Para pengabdian dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Kehadiran dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator yang secara partisipatoris memberdayakan warga masyarakat (Affandi, et al., 2022).

Tahapan Participatory Action Research (PAR) dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dijelaskan dalam buku Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat karya Affandi, *et al.*, (2022) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga refleksi. Adapun tahapannya



Gambar 1. 2 Tahapan Participatory Action Research (PAR)

(Sumber: Buku Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat

karya Affandi, *et al.*, (2022)

a. Tahap *to Know* (Mengetahui Kondisi Riil Komunitas)

Tahap awal penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran kondisi riil penyandang disabilitas yang mengikuti program pelatihan vokasional. Peneliti melakukan proses inkulturasi dengan peserta pelatihan, pendamping, serta pengelola Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi guna membangun kepercayaan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai latar belakang sosial ekonomi, pengalaman, minat dan potensi keterampilan, serta akses terhadap peluang ekonomi. Proses ini bertujuan menghimpun data secara menyeluruh dan mendalam tanpa melakukan analisis atau perumusan masalah.

b. Tahap *to Understand* (Memahami Problem Komunitas)

Tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian ekonomi melalui pelatihan vokasional. Proses pemahaman dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD) bersama penyandang disabilitas, pendamping, dan instruktur vokasional. Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan pengelompokan masalah, identifikasi hambatan, serta pemetaan peluang ekonomi yang tersedia, sehingga diperoleh rumusan masalah kemandirian ekonomi yang disepakati bersama.

c. Tahap *to Plan* (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas)

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disepakati, tahap ini difokuskan pada penyusunan rencana aksi pemberdayaan ekonomi secara partisipatif. Perencanaan dilakukan dengan merumuskan tujuan, strategi, dan langkah operasional program pelatihan vokasional serta pendampingan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan

penyandang disabilitas. Rencana program disusun dengan mempertimbangkan potensi peserta, sumber daya yang tersedia, serta kondisi kelembagaan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi agar program dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan.

d. Tahap *to Act* (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah)

Tahap ini merupakan implementasi dari rencana aksi yang telah disusun bersama. Program pelatihan vokasional dilaksanakan sebagai upaya peningkatan keterampilan, kapasitas, dan kesiapan ekonomi penyandang disabilitas. Pelaksanaan program disertai dengan pendampingan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi, sehingga peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga pengalaman praktis dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

e. Tahap *to Change* (Membangun Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan)

Tahap akhir difokuskan pada refleksi bersama terhadap proses dan hasil pelaksanaan program pelatihan vokasional. Refleksi dilakukan untuk menilai perubahan yang terjadi pada kemampuan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan program. Tahap ini bertujuan membangun kesadaran kritis, komitmen bersama, dan langkah tindak lanjut agar kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dapat terus terjaga pascapelatihan vokasional.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yakni data yang bersifat deskriptif dan berfokus pada pemahaman makna di balik suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik, karena dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa manipulasi variabel, dimana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui penggabungan berbagai metode seperti observasi, wawancara, *forum group discussion* dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan valid. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna (*meaning*) daripada generalisasi (Sugiyono, 2019).

b. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data memegang peranan penting karena menjadi dasar utama dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan dan keandalan sumber data yang digunakan. Menurut Sugiyono (2019:224-225) sumber data adalah asal informasi yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian, baik berupa kata-kata, tindakan, maupun dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pemilihan sumber data harus mempertimbangkan relevansi dan keaslian informasi agar data yang diperoleh benar-benar mendukung tujuan penelitian. Secara umum, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan para informan yang terlibat dalam program pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Informan tersebut meliputi penyandang disabilitas sebagai peserta pelatihan, pendamping atau instruktur program, serta pihak pengelola lembaga. Melalui wawancara, observasi, dan keterlibatan langsung di lingkungan penelitian, peneliti berupaya menggali informasi yang autentik terkait pengalaman, persepsi, serta makna kesetaraan sosial yang mereka rasakan selama proses pemberdayaan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendukung dan memperkuat temuan lapangan. Sumber ini mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan, penelitian terdahulu, serta dokumen resmi. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkaya konteks analisis hasil penelitian (Sugiyono, 2018)

5. Informan dan Penentuan Informan

Informan merupakan narasumber yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Mereka dipilih karena dianggap memahami secara langsung fenomena yang dikaji serta dapat memberikan data yang mendalam dan faktual. Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan

program pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Pokja Disabilitas : Ibu Zulnelly Feriyani
2. Kepala Pokja Pelatihan dan Kewirausahaan : Ibu Tami
3. Pekerja Sosial dan Pendamping Kelas : Ibu Yayuk Sri Rahayu
4. Instruktur Pelatihan Vokasional : Bapak Ahmad Habiballoh
5. Penerima Manfaat penyandang disabilitas : Terdiri atas 1 orang dari kelas dasar, 2 orang dari kelas terampil (yang sedang mengikuti program dan mendekati masa terminasi), serta 1 orang yang telah menyelesaikan program (alumni pelatihan vokasional)
6. Informan untuk FGD 9 orang (penerima manfaat penyandang disabilitas yang akan terminasi)

Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara menyeluruh proses, pelaksanaan, serta dampak program terhadap peningkatan kesetaraan sosial penyandang disabilitas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pelatihan untuk mengamati aktivitas peserta, interaksi antara pendamping dan penyandang disabilitas, serta kondisi lingkungan pelatihan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Observasi

merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk memahami perilaku, kejadian, atau situasi sosial tertentu. Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan dinamika yang terjadi selama proses pelatihan pemberdayaan (Moleong, 2017).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para informan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai proses pelatihan, pengalaman partisipan, serta dampak program terhadap peningkatan kemandirian dan kesetaraan sosial. Menurut Sugiyono (2018:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara langsung guna memperoleh klarifikasi terhadap poin-poin yang dibutuhkan.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau yang biasa dikenal sebagai diskusi kelompok terarah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dinamika interaksi dalam kelompok melalui proses tanya jawab dan pembahasan yang terfokus. Metode ini menjadi bagian penting dalam pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), karena melibatkan partisipasi aktif peserta dengan dukungan berbagai alat dan materi yang digunakan dalam penelitian partisipatif. Menurut Irwanto (2006:1–3), FGD merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok dengan menitikberatkan pada pembahasan suatu isu atau topik tertentu secara spesifik. Dengan demikian, FGD

memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam melalui pertukaran pandangan dan pengalaman antar peserta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data primer dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti foto kegiatan, laporan pelatihan, data peserta, serta arsip lembaga yang relevan. Menurut Sugiyono (2018), metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari catatan, arsip, buku, maupun laporan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat berfungsi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat, terpercaya, dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, metode, atau waktu untuk memperoleh konsistensi informasi (Sugiyono, 2018).

Triangulasi dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta perbandingan informasi dari berbagai informan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi (Moleong, 2017). Dengan teknik-teknik tersebut, peneliti dapat meningkatkan validitas dan keandalan data sehingga hasil penelitian lebih dapat dipertanggungjawabkan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap jawaban informan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila jawaban yang diberikan informan dianggap belum memadai atau kurang mendalam, peneliti akan melanjutkan pertanyaan tambahan hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kredibilitas yang memadai.

Proses ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019:167) menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif, berkesinambungan, dan berlangsung sepanjang penelitian, sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu sebagai berikut ini:

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi. Peneliti memilih data penting yang sesuai dengan fokus penelitian, membuang informasi yang kurang relevan, serta menandai pola atau tema awal yang muncul dari lapangan. Reduksi data memungkinkan peneliti untuk mengelola informasi secara sistematis sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah disederhanakan disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan alur, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar data dan pola yang muncul. Penyajian data yang sistematis juga membantu dalam menggambarkan

proses pelatihan vokasional, interaksi antara peserta, instruktur, dan pendamping, serta dampak kegiatan terhadap kemandirian ekonomi peserta.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan data untuk menemukan tema-tema utama, pola interaksi, serta makna sosial yang muncul. Kesimpulan awal bersifat sementara dan terus diperiksa ulang melalui triangulasi serta member check untuk memastikan kebenaran dan kredibilitas data. Dengan cara ini, peneliti dapat meminimalkan subjektivitas dan memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis data ini dilakukan secara iteratif, artinya peneliti selalu kembali ke data lapangan untuk memperkuat temuan, meninjau kembali interpretasi, dan menyesuaikan fokus analisis sesuai dinamika yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya sekadar mendeskripsikan fakta, tetapi juga menafsirkan makna sosial di balik perilaku, pengalaman, dan interaksi peserta. Dengan demikian, teknik analisis data yang diterapkan dapat memberikan gambaran yang holistik, mendalam, dan kontekstual mengenai pelatihan vokasional di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian dan kesetaraan sosial penyandang disabilitas.